

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara

A Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia, 2004

Delvi Indriadi, *Hasil penelitian program "Transmigrasi dan Skema Kemitraan"*, The Institute for Ecosoc Rights dan NHCR, 19 Oktober 2016

Djoko Muljono, *Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Jakarta, penerbit buku Kompas

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Dedy N. Hidayat. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003,

Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi Ke 7*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2011

Eric Le Borgne and Katherine Baer, www.imf.org/publishing/special issued/Tax Amnsety, Theory, Trends and Some Alternative, 31-12-2016

Hari S Luitsel, *Is Tax Amnesty a Good Tax Policy? Evidence from State Tax Amnesty Programs in United State*. Lexington Book, London, United Kingdom, 2014

James Andreoni, Brian Erard and Jonathan Feinstein *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, No. 2 (Jun., 1998)

- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Assiddiqie, 1998, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realita Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI*, Jakarta, 1998.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Lili Rasyidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, UNPAD 2005
- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996,
- Miriam Budiardjo, 2008, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta,
- Moh Kusnadi dan Bintang R , *Ilmu Negara*, edisi revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000, F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta, 1966
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Moh Kusnadi dan Bintang R , *Ilmu Negara*, edisi revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000, F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta, 1966
- Munir Fuady, *Teori-teoeri besar dalam hukum*, jakarta, Kencana Prenadamedia, 2013 <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/Rahman Amin, Filsafat Hukum Aliran Utilitarianisme dan Relevansinya di Indonesia>,
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep hukum Dalam pembangunan, Bandung, Alumni, 2002*

- Munir Fuadi, *Sejarah Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2009
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2006
- Santoso Brotodihardho, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Revika Aditama, Bandung 1982
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1998
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas , *Perpajakan Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2010
- Abdul Mukti Fajar September 2005. *Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA*, Jurnal Konstitusi Volume 2, Nomor 2.
- Menurut kamus bahas Indonesia “Analitis” artinya bersifat analisis. Arti analisis diantaranya adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Lihat Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap*

Bahasa Indonesia (KBI Besar). Serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosakata Baru, Surabaya, Amanah, 1997,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Undang-undang no 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan no 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan uu no 11 tahun 2006 tentang pengampunan pajak

Peraturan Menteri Keuangan no 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dan penempatan pada instrumen investasi dan pasar investasi dalam rangka pengampunan pajak.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63/PUU/XIV/2016 tentang putusan atas gugatan terhadap UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

C. JURNAL HASIL PENELITIAN

Delvi Indriadi, *Hasil penelitian program "Transmigrasi dan Skema Kemitraan"* ,
The Institute for Ecosoc Rights dan NHCR, 19 Oktober 2016

Fadjar, Mukthie, A, September 2005. *Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA*,
Jurnal Konstitusi Volume 2, Nomor 2.

Hasil Penelitian Centre For Indonesia Taxation Anlysis

D. MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK

<http://www/bisnis.liputan6.com/read/2606430/djp-ungkap-modus-baru-penghindaran-pajak>, 20 Sep 2016, 15:44 WIB

Bisniskeuangan.kompas.com/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.... 6 Apr 2016.

www.unisosdem.org/Amich Alhumami, Retorika Negara Kesejahteraan, Harian Kompas,

[Osukmana.blogspot.com/2015/12/Oman-Sukmana,Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan \(Welfare State\)](http://Osukmana.blogspot.com/2015/12/Oman-Sukmana-Konsep-dan-Desain-Negara-Kesejahteraan-(Welfare-State))

[http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/Rahman Amin, Filsafat Hukum Aliran Utilitarianisme dan Relevansinya di Indonesia,](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/Rahman-Amin-Filsafat-Hukum-Aliran-Utilitarianisme-dan-Relevansinya-di-Indonesia)

www.kemenkeu.go.id , Eri Hariyanto, *SBN sebagai Instrumen Repatriasi Dana Tax Amnesty*, 20 June 2016 - 07:43

www.ohoinggurwalek.blogspot.com / Cornelis Materay, *Prospektif Pasca Tax amnesty Terhadap Kesejahteraan Rakyat*, diakses 26 mei 2017

<https://media.neliti.com/media/publications/646-ID-mengapa-harus-berurusan-dengan-pajak.pdf>, diakses

Laporan menteri keuangan APBN 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/Rp2600-t-jadi-alasan-kuat-bank-singapura-takut-tax-amnesty>?Rabu, 21/09/2016 12:17 WIB

Wawancara dengan bagian Humas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI 21 Januari 2019

www.merdeka.com/menengok-efektaxamnestyjelangtahun2018, Jum'at 29 Desember 2017 06:00

www.pajak.go.id/pojok-pajak/refkesi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak/5 januari 2018

- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003,hal9.
- Dedy N. Hidayat. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*,Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003,
- Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Jakarta, Rineka Cipta,2002.
- Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002,
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal 26
- Lili Rasyidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*,Bandung, UNPAD, 2005, hlm 4
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat; Buku kedua pengantar kepada teori ilmu pengetahuan*. (Jakarta: Bulan bintang.1991)hal.68
- A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007. hal 25
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004,
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986),
- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011

Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th.

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

Konsep efisiensi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan secara maksimal. Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkat maksimal bila barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (yang diukur dengan kemauan individu untuk membayar barang dan jasa). Lihat gagasan ini dalam Chatamarrasyid Ais, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, dalam Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta pada 4 Oktober 2003. Lihat juga Richard A.Posner, Economic Analysis of Law, (Boston and Toronto, Little:Brown and Company, 2006)

Mubyarto, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998).

Pierson ,*The New Politics of the Welfare State -Journal Law Harvard University*, 2007 hal 9

Suharto, Edi (2005a),Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama. 2007, hal 27

Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. Mimpi Negar Kesejahteraan, Jakarta: LP3ES. 2006,

Esping-Andersen Highlights the salient characteristics of the Three Types of. *Welfare States*.1990,

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi reevisi). Jakarta: Gramedia.2008

Barr, Nicholas. *The Economics of the Welfare State*. California: Stanford University Press.1998.

Triwibowo D dan S Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta,LP3ES, 2006,

Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Dalam Perspektif Teori Masalah*,

Mahmud Kusuma,*Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Library, Yogyakarta, 2009, hal 60.

Satjipto Raharjo,*Membedah Hukum Progresif*,Kompas, Jakarta, 2006, hal 55

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal 37

www.kemenkeu.go.id , Eri Hariyanto, *SBN sebagai Instrumen Repatriasi Dana Tax Amnesty*,20 June 2016 - 07:43

Hari S Luitsel,Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?Evidence from State Tax Amnesty Programs in United State.Lexington Book, London, United Kingdom,2014,.

Richard W. Tresch,Public Finance: A Normative Theory, Edisi ke 3, Boston Collages, Ceshnut Hill, Massachusetts, 2015,

Urip Santoso dan Justina Setiawan. Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia, Kopertis, Volume 11 No.2 Juli 2009

ErwinSilitonga, dalam makalah yang berjudul “ Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum”,2006

www.ohoinggurwalek.blogspot.com / Cornelis Materay, *Prospektif Pasca Tax amnesty Terhadap Kesejahteraan Rakyat*, diakses 26 mei 2017

Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta,2008:16-17

Eric Le Borgne and Katherine Baer, www.imf.org/publishing/special issued/Tax
Amnsety,Theory, Trends and Some Alternative, 31-12-2016

James Andreoni,Brian Erard and Jonathan Feinstein *Journal of Economic
Literature*,Vol. 36, No. 2 (Jun., 1998),hal 818-860

Sumber:situs Dirjen Pajak,www.pajak.go.id

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,(Jakarta : Raja Wali Pers,
2014),

Paparan Tax Amnesty, [https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/images/taxamnesty/
Paparan%20Tax%20Amnesty.pdf](https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/images/taxamnesty/Paparan%20Tax%20Amnesty.pdf), diakses tanggal 31Desember 2016

Nomensen Sinamo, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : BIS, 2011), hal. 13.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2005, h. 942, Akses 16 September 2018.

Bryan A.Garner, Black' Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h.
1278. Akses 16 September 2018

B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469, Akses
16 September 2018

<http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English
Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Akses 16 September
2018.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, (Bandung:Penerbit Alumni,
1981), Hlm. 153, Akses 23 September 2018.

Taswan Ibrahim dan Ragimun.(2014). Moral hazard dan Pencegahannya Pada
Industri Perbankan di Indonesia.www.kemenkeu.go.id Diakses pada
tanggal 16 Pebruari 2017.